

## TATA KELOLA PEMERINTAHAN PUSAT DALAM PENGEMBANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

Sahala Purba<sup>1\*</sup>  
Kuras Purba<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Methodist Indonesia  
<sup>2</sup>Universitas Sari Mutiara Indonesia

\*[sahala824@gmail.com](mailto:sahala824@gmail.com)

### Abstract

*This research intends to evaluate whether the development of North Tapanuli Regency which is located in North Sumatra Province is successful or not in terms of the analysis of local government financial statements from 8 aspects of measurement, including: Proportion of Regional Financial Autonomy, Proportion of Regional Financial Independence, Proportion of Size of Fiscal Decentralization, Proportion of Effectiveness PAD, Proportion of Efficiency of PAD, Proportion of Effectiveness of Regional Taxes, Proportion of Efficiency of Regional Taxes and Proportion of Contribution Size of BUMD. This research is quantitative descriptive research with the subject of research on local government financial information during 2013-2020, and the object of research is Information on Budget Realization, Balance Sheet, and Information on Details of Regency PAD Revenue. The data collection technique used is the documentation method. The data analysis technique used is financial proportion analysis. The results of the research show that out of 8 (eight) proportions of measurement of regional government financial statement analysis, West Pakpak district experienced failure in development in terms of 5 (five) proportions, namely Proportion of Regional Financial Autonomy, Proportion of Regional Financial Independency, Proportion of Size of Fiscal Decentralization, Proportion of PAD Efficiency, Proportion of Regional Tax Efficiency, while Toba district only has a weakness in the Proportion of Size of Fiscal Decentralization, Humbang Hasundutan Regency is only weak in the Proportion of Effectiveness of PAD while Samori Regency is weak in the Proportion of Contribution Size of BUMD, meaning that it can be concluded that overall the central government has succeeded in developing Tapanuli Regency North.*

**Keywords:** *Financial Information Analysis, Financial Performance, North Tapanuli Regency Development*

### Abstrak

*Riset ini bermaksud untuk mengevaluasi apakah pengembangan Kabupaten Tapanuli Utara yang terletak di Provinsi Sumatera Utara berhasil atau tidak ditinjau dari analisis laporan keuangan pemerintah daerah dari 8 aspek pengukuran antara lain: Proporsi Otonomi Finansial Daerah, Proporsi Ketidakmandirian Finansial Daerah, Proporsi Ukuran Desentralisasi Fiskal, Proporsi Keefektifan PAD, Proporsi Keefisienan PAD, Proporsi Keefektifan Pajak Daerah, Proporsi Keefisienan Pajak Daerah dan Proporsi Ukuran Sumbangan BUMD. Riset ini adalah riset deskriptif*

*kuantitatif dengan Subjek Riset informasi Finansial pemerintah daerah selama tahun 2013-2020, dan objek riset Informasi Realisasi Anggaran, Neraca, dan Informasi Rincian Penerimaan PAD Kabupaten. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah metode dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai adalah analisis proporsi finansial. Hasil riset menunjukkan, dari 8 (delapan) proporsi pengukuran analisis laporan keuangan pemerintahan daerah terdapat kabupaten Pakpak Barat mengalami kegagalan dalam pengembangan ditinjau 5 (lima) proporsi yaitu Proporsi Otonomi Finansial Daerah, Proporsi Ketidakmandirian Finansial Daerah, Proporsi Ukuran Desentralisasi Fiskal, Proporsi Keefisienan PAD, Proporsi Keefisienan Pajak Daerah, sedangkan kabupaten Toba hanya memiliki kelemahan pada Proporsi Ukuran Desentralisasi Fiskal, Kabupaten Humbang Hasundutan hanya lemah pada Proporsi Keefektifan PAD sedangkan Kabupaten Samori lemah dari Proporsi Ukuran Sumbangan BUMD, berarti bisa diambil kesimpulannya secara keseluruhan pemerintah pusat telah berhasil melakukan pengembangan Kabupaten Tapanuli Utara.*

**Kata Kunci:** Analisis Informasi Finansial, Performa Finansial, Pengembangan Kabupaten Tapanuli Utara

**JEL Classification :** M48, L38, J21, J18, I38, H11

*Submission date : August 2022*

*Accepted Date : September 2022*

*\*Corresponding Author*

## **PENDAHULUAN**

Pada masa pemerintahan Belanda yang bertempat di Kota Sibolga. Keresidenan Tapanuli pada dulunya dikatakan Residentie Tapanuli terdapat 4 Afdeling (Kabupaten) yaitu Afdeling Batak Landen, Afdeling Padang Sidempuan, Afdeling Sibolga dan Afdeling Nias. Afdeling Batak Landen yang dikepalai seorang Asisten Residen yang ibu kotanya berkedudukan di Kota Tarutung (Wikipedia, n.d.)

Kabupaten Tapanuli Utara pada awalnya telah dimekar jadi Kabupaten Dairi pada tahun 1956, pada tahun 1998 sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1998 Tapanuli Utara dikemangkan kembali jadi Kabupaten Toba Samosir, pada tahun 2003 pengembangan ketiga Kabupaten Tapanuli Utara dilakukan kembali jadi adanya kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan UU No. 9 Tahun 2003 serta Kabupaten Dairi kembali dikemangkan jadi Kabupaten Pakpak Barat, selanjutnya pada tahun 2003 dengan UU No. 36/2003 Kabupaten Toba Samosir dikemangkan lagi menjadi Kabupaten Samosir dan yang terakhir adanya perubahan nama Kabupaten Toba Samosir jadi Kabupaten Toba sesuai dengan PP No. 14 Tahun 2020 pada tanggal 3 Maret 2020

Pemerintah pusat sudah memutuskan dua undang-undang (UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014) serta (UU RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2004). Dengan adanya pengesahan UU Nomor 23 Tahun 2014 maka Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki diikuti dengan adanya sumber daya manusia yang mumpuni akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kedamaian masyarakat setempat melalui pembangunan infrastruktur dan layanan

publik yang optimal, dengan terjadinya desentralisasi ini kemudahan dalam pengendalian yang dilakukan oleh pemangku daerah dapat lebih leluasa jika dibandingkan dengan sentralisasi, Pemerintah daerah telah diserahkan tanggung jawab untuk lebih efektif dalam menggarap sendiri kegiatan-kegiatan penyelenggaraan daerah (Dora dalam jurnal (Siswanto & Maylani, 2022)).

Pemangku otonomi daerah diminta untuk menjalankan program pemerintah yang lebih efektif dan efisien dalam menggunakan anggaran belanja daerah secara tepat waktu serta tepat sasaran, dengan terwujudnya efektivitas dan efisiensi ini diharapkan program-program kegiatan pemerintah daerah dapat terwujud, dengan adanya otonomi daerah ini diharapkan pemangku pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber daya alam yang ada dalam wilayah daerah masing-masing, sehingga diharapkan dapat menaikkan PADnya, dimana selama ini ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat sangat tinggi sekali, ini berarti pemerintah daerah tidak betul-betul bekerja dalam menggali potensi alam yang ada dalam wilayahnya, ini bisa terlihat dari laporan keuangan pemerintah yang mayoritas ketidakmandiriannya sangat tinggi. Salah satu kesuksesan pemangku daerah dalam pengembangan daerah adalah ketika daerah yang dikembangkan dapat bertumbuh sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan (Susilawati *et al.*, 2018)

Pemekaran daerah diharapkan dapat menaikkan kemandirian keuangan daerah dalam mengalih potensi sumber daya alam yang dimiliki, tetapi sampai sekarang masih banyak daerah yang dimekarkan maupun daerah yang tidak dimekarkan tidak dapat melakukan kemandirian keuangannya, ini berarti para pemangku kepentingan daerah tidak dapat mengalih potensi alam yang ada disekitarnya dan juga tidak dapat mendatangkan para investor asing untuk melakukan investasi pada daerah masing-masing, sehingga dengan lemahnya kemandirian daerah ini, para pemangku pemerintah daerah hanya banyak meminta bantu sumbangan kepada pusat untuk menutupi belanja operasionalnya, hal ini didukung oleh para peneliti-peneliti yang dilakukan oleh (Siswanto & Maylani, 2022), (Nugraeni *et al.*, 2022), (Marliani, 2022), (Mulyaningsih & Sunaningsih, 2022), (Hakim & Rosidah, 2021), (Nalle *et al.*, 2021), (Drastiana & Himmati, 2021), (Setianingrum & Haryanto, 2020), (Zukhri, 2020), (Purbandari, 2019), (Susanto, 2019), (Farida & Nugraha, 2019), (Sartika, 2019), (Tanan & Duri, 2018), (Susilawati *et al.*, 2018), (Saputra & Fernando, 2017) dan (Hariyanti *et al.*, 2017) yang menyatakan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih sangat rendah, tetapi menurut (Melmbessy, 2022) rasio kemandirian masuk dalam kategori sedang tetapi menurut (Amanda *et al.*, 2021) ada 2 tahun mengalami penurunan dan 2 tahun berikutnya mengalami kenaikan.

Ketergantungan keuangan daerah masih sangat mayoritas tinggi kepada pemerintah pusat, pemangku kepentingan daerah tidak mau bekerja keras dalam mengalih potensi alam yang ada disekitarnya, karena pemangku kepentingan daerah beranggapan bahwa jika dananya kurang bisa diminta dari pemerintah pusat, akibatnya pemerintah daerah kurang berusaha dalam menaikkan pendapatan asli daerahnya serta tidak adanya *funishment* kepada pemangku kepentingan apabila pendapatan asli daerahnya tidak mengalami kenaikan, akibat tidak adanya *funishment* inilah yang mengakibatkan ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi kepada pusat, akibatnya negara kita semakin lama semakin banyak hutang untuk menutupi APBN dan APBD, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Melmbessy, 2022), (Siswanto & Maylani, 2022), (Marliani, 2022), (Nalle *et al.*, 2021), (Sakinah & Satriawan, 2021), (Zukhri, 2020), (Susilawati *et al.*, 2018), (Saputra & Fernando, 2017) dan (Tanan &

Duri, 2018) yang menyatakan bahwa ketergantungan keuangan daerah masih sangat tinggi kepada pemerintahan pusat. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widiyaningsih & Prihatiningsih, 2021) yang menyatakan bahwa ketergantungan keuangan daerah kepada pusat sudah mulai membaik

Derajat desentralisasi fiskal digunakan untuk menganalisis seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belajar daerahnya yang diukur dari pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan daerah, daerah yang bagus adalah ketika pendapatan asli daerahnya lebih besar dari pendapatan transfer dari pusat, tetapi jika dilihat dari fakta dilapangan yang menyatakan bahwa derajat desentralisasi masih kategori sedang sampai rendah untuk beberapa kabupaten dan kota yang ada di provinsi yang ada di Indonesia ini, penyebabnya juga kurang sungguh-sungguh pemangku kepentingan daerah dalam mengalih potensi alam yang ada dalam kabupaten dan kota masing-masing, sehingga tidak dapat mengoptimalkan dalam pencapaian PADnya, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Siswanto & Maylani, 2022), (Sakinah & Satriawan, 2021) dan (Susilawati *et al.*, 2018) yang menyatakan bahwa derajat desentralisasi fiskal masih dalam kategori cukup, tetapi berbeda dengan dan (Nalle *et al.*, 2021) (Zukhri, 2020), (Saputra & Fernando, 2017) yang mengungkapkan bahwa derajat desentralisasi fiskal masuk dalam kelompok sedang sampai dengan cukup dan tetapi yang paling tidak bagus yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh (Melmbessy, 2022), (Harahap, 2020), (Tanan & Duri, 2018) dan (Hariyanti *et al.*, 2017), yang menyatakan kurang sampai rendah sekali

Dalam hal Efektifitas PAD, mayoritas pemerintah daerah telah efektif dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang dianggarkan, ini disebabkan pemerintah daerah hanya menaikkan sebagian kecil saja, artinya anggaran PADnya yang dibuat tidak menggambarkan secara optimal dalam menggali potensi alam yang ada dalam lingkungan pemerintah daerah, sehingga dengan adanya kesungguhan dari pemangku kepentingan daerah akan dapat menggali potensi alam di sekitar daerah masing-masing untuk menaikkan PADnya dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat setempat, hal inilah yang membuat efektifitas PAD selalu efektif karena kenaikan anggarannya hanya kecil tahun demi tahun, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Siswanto & Maylani, 2022), (Marliani, 2022), (Sakinah & Satriawan, 2021), (Hakim & Rosidah, 2021), (Farida & Nugraha, 2019) dan (Susanto, 2019) yang menyatakan bahwa efektifitas PAD sudah masuk dalam kelompok efektif, tetapi menurut (Melmbessy, 2022), (Mulyaningsih & Sunaningsih, 2022), (Nugraeni *et al.*, 2022) (Setianingrum & Haryanto, 2020), (Tanan & Duri, 2018) dan (Saputra & Fernando, 2017) yang menyatakan bahwa efektifitas PAD masuk dalam kelompok sangat efektif, dan bahkan ada juga yang masuk dalam kategori tidak efektif yang dilakukan peneliti (Drastiana & Himmati, 2021) dan (Amanda *et al.*, 2021)

Efisiensi PAD pada umumnya pemerintah daerah melakukan efisiensi PAD yang artinya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan PAD relatif lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan PADnya, jika ditinjau dari rasio ini banyak pemerintah daerah yang berhasil melakukan efisiensi PAD, Cuma yang menjadi kendala yang paling besar itu adalah penerimaan PADnya tidak pernah lebih besar dari pendapatan transfer, seandainya pemerintah daerah di Indonesia dapat mencapai pendapatan aslinya lebih besar dari pendapatan transfer, maka bisa dipastikan negara kita ini bisa dikategorikan menjadi negara maju, tetapi itu sangat sulit dilaksanakan karena kurangnya keseriusan pemangku kepentingan daerah dalam mengalih potensi alamnya, masalah efisiensi PAD ini banyak peneliti yang menyatakan bahwa efisiensi

PADnya sangat efisien dan efisien yang dilakukan oleh (Siswanto & Maylani, 2022), (Mulyaningsih & Sunaningsih, 2022), (Marliani, 2022), (Drastiana & Himmati, 2021), (Hakim & Rosidah, 2021), (Moridu, 2021), (Tanan & Duri, 2018), (Taras & Artini, 2017) dan (Susilawati *et al.*, 2018) tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amanda *et al.*, 2021), (Susanto, 2019), (Farida & Nugraha, 2019) dan (Saputra & Fernando, 2017) yang menyatakan bahwa efisiensi PAD masih dalam kategori tidak efisien

Rasio efektivitas pajak daerah adalah kesanggupan pemerintah daerah dalam menagih pajak daerahnya masing-masing sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah pada awalnya, jika dilihat dari fakta-fakta dilapangan telah banyak pemerintah daerah yang melakukan efektifitas dalam penagihan pajak daerah sesuai dengan yang telah dianggarkan, hal ini senada dengan penulis yang diperbuat oleh (Yakub *et al.*, 2022), (Siswanto & Maylani, 2022) dan (Taras & Artini, 2017) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah telah efektif dalam penagihan pajak daerahnya.

Rasio efisiensi pajak daerah adalah biaya yang dikeluarkan dalam penagihan pajak daerah lebih kecil jika dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah, hal ini sangat baik bagi pemerintah daerah jika hal ini dapat diterapkan dalam pemerintahannya, dengan adanya efisiensi ini akan dapat mempergunakan pajak daerah tersebut untuk kepentingan masyarakat setempat di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, maka dengan demikian kesejahteraan masyarakat setempat akan tercapai, dari hasil penelitian terdahulu banyak yang menyatakan bahwa rasio efisiensi pajak daerah sangat efisiensi yang dilakukan oleh penelitian (Siswanto & Maylani, 2022) dan (Taras & Artini, 2017),

Derajat kontribusi BUMD, ujung tombak terakhir dari PADnya adalah dengan mengoptimalkan potensi alam yang ada disekitar daerah pemerintah daerah dengan cara membentuk BUMD, semakin banyak BUMD yang terbentuk diharapkan dapat menyempangkan PADnya, tetapi kenyataan dilapangan masih banyak pemerintah daerah yang belum optimal dalam menjalankan BUMD sehingga bisa dilihat dividen yang didapatkan dari laba BUMD nya rata-rata sangat kecil, akibatnya PADnya juga sangat kecil, hal ini lah yang membuat pemerintah daerah tidak optimal dalam menggali potensi alam yang ada dalam sekitar daerah masing-masing, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Siswanto & Maylani, 2022) yang menyatakan bahwa derajat kontribusi BUMD masih dalam kategori cukup baik, tetapi terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tanan & Duri, 2018) yang menyatakan bahwa kota Jayapura kontribusi BUMDnya masih dalam kelompok kecil, sedangkan menurut (Widiyaningsih & Prihatiningsih, 2021) bahwa derajat kontribusi BUMD pada Kota Surakarta sudah tergolong baik.

Adapun kegunaan dari riset ini adalah untuk mengevaluasi apakah pengembangan kabupaten Tapanuli Utara yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat berhasil atau tidak jika ditinjau dari analisis laporan keuangan dengan 8 proporsi pengukuran selama 8 tahun pengamatan, dan juga sebagai evaluasi kepada masyarakat setempat akan kinerja pemimpin daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah selama 8 tahun tersebut.

Adapun perbedaan riset ini adalah riset ini belum pernah diteliti dalam hal mengevaluasi pengembangan kabupaten yang terjadi di Indonesia ini, laporan keuangan yang dianalisis selama 8 (delapan) tahun (2013-2020) dan pengukuran yang digunakan menggunakan 8 proporsi.

## **Telaah Pustaka**

### **Proporsi Otonomi Keuangan daerah**

Proporsi otonomi keuangan daerah adalah proporsi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi otonomi keuangan pemerintah daerah dalam rangka pengeluaran pembiayaan infrastruktur, Pelayanan publik dan kegiatan pemerintah lainnya. Proporsi Otonomi keuangan daerah dalam jumlah PAD relatif terhadap pendapatan daerah ditunjukkan dengan benar yang bersumber dari penghasilan lain seperti penghasilan transfer. Semakin tinggi nilai proporsi otonomi keuangan daerah berarti semakin tinggi pula otonomi keuangan daerah yang dimiliki (Abdul Halim, 2012).

### **Proporsi Ketidakmandirian Keuangan Daerah**

Proporsi Ketidakmandirian keuangan daerah diperoleh dengan cara menandingkan total pemasukan dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah, dengan pendapatan asli daerah bruto (Mahmudi, 2016) diharapkan proporsi ketidakmandirian keuangan daerah ini adalah kecil, sehingga daerah-daerah yang diotonom semakin mandiri dalam memperoleh pemasukan dari daerah masing-masing untuk belanja operasional daerah masing-masing.

### **Proporsi Ukuran Desentralisasi Fiskus**

Proporsi asas desentralisasi fiskus menggunakan indikator sejauh mana kewenangan dan responsibilitas yang dikasih kepada pemerintah daerah untuk mengakali dan memaksimalkan pendapatan daerah. Ukuran desentralisasi merupakan salah satu manfaat finansial yang dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat kompetensi dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Proporsi ini merupakan besaran kontribusi PAD terhadap total pendapatan asli daerah. Semakin tinggi sumbangan PAD maka semakin tinggi pula kapabilitas pemerintah daerah dalam mewujudkan desentralisasi (Bisma & Susanto, 2010).

### **Proporsi Efektivitas Penghasilan Asli Daerah**

Proporsi Keefektifan penghasilan asli daerah adalah sebagai penjelasan atas pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah yang terprogram dengan anggaran tetap berdasarkan kapasitas aktual masing-masing daerah. Proporsi Keefektifan dimaksudkan untuk membahas seberapa besar Keefektifan dari program keuangan daerah yang dilaksanakan pemangku kepentingan daerah. Proporsi Keefektifan PAD mengatakan kapabilitas pemerintah daerah dalam mengatur pemasukan PAD sesuai dengan yang dianggarkan (Mahmudi, 2016)

### **Proporsi Keefisienan Penghasilan Asli Daerah**

Proporsi Keefisienan PAD perlu diperhitungkan untuk menakar besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam mendapatkan pemasukan asli daerah dengan cara mengalih potensi alam yang ada dalam sekitarnya secara maksimum. Proporsi ini dihitung dengan cara menandingkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan PAD dengan menandingkan realisasi PAD (Mahmudi, 2016). Semakin kecil nilai proporsi ini maka semakin efisien pemerintah daerah dalam melaksanakan perolehan pemasukan asli daerahnya (Abdul Halim, 2012)

### **Proporsi Efektifitas Fiskus daerah**

Keefektifan fiskus daerah adalah seberapa efektif pemangku kepentingan daerah dalam penagihan pajak daerah yang telah dianggarkan dibandingkan dengan anggaran yang dibuat, pemerintahan yang baik adalah ketika semua program yang telah ditetapkan pada awalnya dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Keefektifan merupakan perbandingan realisasi dengan anggaran. realisasi perwujudan akibat suatu kegiatan atau program terhadap warga sedangkan *output* merupakan hasil yang dicapai dari suatu program aktivitas dan kebijakan (Mahsun, 2019). Analisis efektifitas fiskus daerah yaitu analisis yang mencerminkan kapabilitas pemerintah daerah dalam target/anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Abdul Halim, 2012). Semakin tinggi proporsi ini maka semakin bagus bagi pemerintahan daerah.

### **Proporsi Keefisienan Fiskus daerah**

Keefisienan fiskus daerah mengacu pada cara mereka beroperasi, dapat dikatakan bahwa efisiensi produksi ketika menghasilkan produk dengan penggunaan sumber daya dan sumber daya yang efektif, efisiensi adalah perbandingan produksi dan impor. Output adalah pelaksanaan pengeluaran untuk pembangkitan pendapatan daerah dan input merupakan pelaksanaan pendapatan daerah (Mahsun, 2019). Efisiensi otoritas pajak dievaluasi di otoritas pajak daerah, jika tingkat yang dicapai kurang dari 10%, efisiensi otoritas pajak daerah tercapai.

### **Proporsi Ukuran Sumbangan BUMD**

BUMD adalah entitas ekonomi yang berdasarkan Pasal 1(40) (RU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 2014) dan Pasal 1(1) (PP, 2017), seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Proporsi ini berguna untuk mengetahui seberapa besar kontribusi bisnis lokal dalam mendukung pendapatan lokal. Proporsi ini dihitung dengan menandingkan pendapatan daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah dibagi dengan total Pendapatan Asli Daerah (Mahmudi, 2016)

### **Metodologi Riset**

Metodologi riset ini memakai deskripsi kuantitatif dengan menelaah informasi finansial yang telah diaudit oleh BPK Sumut periode 2013-2020. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Langkah selanjutnya adalah menghitung bobot dari data keuangan yang diperoleh. Data tersebut kemudian dianalisis menurut para ahli yang sudah ada, kemudian dinarasikan ke dalam keadaan sebenarnya dilapangan untuk mengambil keputusan mengenai penjelasan kinerja keuangan pemerintah daerah induk dan kabupaten yang dimekarkan (Taras & Artini, 2017). Analisis laporan keuangan dimanfaatkan untuk mendalami problem dan peluang yang ada dalam laporan keuangan (Mahsun, 2019). Analisis performa keuangan yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi mengenai keuangan pemerintah daerah induk dan keuangan daerah pemekaran sebagai komponen dalam pengambilan keputusan dan penilaian. Performa keuangan pemerintah daerah periode 2013-2020 yang akan dianalisis. Proporsi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Proporsi Otonomi Finansial Daerah, Proporsi Ketidakmandirian Keuangan daerah, Proporsi Ukuran Desentralisasi Fiskus, Proporsi Keefektifan PAD, Proporsi Keefisienan PAD, Proporsi Keefektifan Fiskus daerah, Proporsi Keefisienan Fiskus daerah, Proporsi Ukuran Sumbangan BUMD.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Proporsi Otonomi

Proporsi Otonomi ini untuk menakar seberapa besar sumbangsih realisasi total PAD dibandingkan dengan penghasilan transfer yang diperoleh oleh setiap Kabupaten induk (Tapanuli Utara) serta hasil pengembangan kabupaten Tapanuli Utara setiap tahunnya, untuk melihat apakah hasil pengembangan kabupaten Tapanuli Utara yang dilakukan oleh pemerintahan pusat berhasil atau tidak. Tolak ukurnya adalah ketika rata-rata rasio proporsi otonominya mendekati atau lebih bagus dari kabupaten induknya berarti dikatakan pemerintah berhasil melakukan pengembangan Kabupaten Induk, tetapi sebaliknya jika rasionya jauh berbeda dengan rasio induknya maka bisa dikatakan pemerintah pusat gagal dalam melakukan pengembangan induknya.

Jika dilihat dari tabel 1 rata-rata proporsi otonomi selama tahun 2013 – 2020 diperoleh rasionya kabupaten Induk selama 8 tahun tersebut sebesar 9,85% masih di kategori sangat rendah sekali dengan pola hubungan instruktif, sedangkan rata—rata rasio kabupaten pengembangan tidak jauh beda dengan rasio induknya, tetapi yang menjadi evaluasi untuk pemerintah pusat adalah Kabupaten Pakpak Barat dimana rata-rata rasionya selama 8 tahun hanya sebesar 4,54%, bisa dikatakan Pemerintah pusat telah gagal melakukan pengembangan Kabupaten Pakpak Barat dari Kabupaten Dairi jika ditinjau dari segi proporsi otonomi.

**Tabel 1**  
**Proporsi Otonomi**

Tahun	Proporsi Otonomi (dalam %)								Rata-rata (Dalam %)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Tapanuli Utara	4.98	8.16	8.00	8.70	15.39	9.39	11.81	12.36	<b>9.85</b>
<b>Hasil Pengembangan Tapanuli Utara</b>									
Dairi	4.41	7.57	7.18	6.97	12.79	7.76	7.23	9.90	<b>7.98</b>
Pakpak Barat	2.49	3.52	5.33	3.79	6.07	3.95	6.90	4.27	<b>4.54</b>
Humbang Hasundutan	3.03	4.47	5.12	5.56	11.45	12.89	9.60	9.78	<b>7.74</b>
Toba	3.47	3.75	4.15	3.30	3.44	7.17	6.91	7.84	<b>5.00</b>
Samosir	5.98	7.17	5.33	5.36	9.62	6.47	7.41	8.19	<b>6.94</b>
<b>Rata-Rata</b>	<b>3.88</b>	<b>5.30</b>	<b>5.42</b>	<b>5.00</b>	<b>8.67</b>	<b>7.65</b>	<b>7.61</b>	<b>7.99</b>	<b>6.44</b>

Sumber: Hasil olahan dari Informasi Laporan keuangan daerah Hasil Pemeriksaan BPK Sumut, 2022

Otonomi(%)	Kapasitas keuangan	Model koneksi
0% - 25%	Sangat Rendah Sekali	Instruktif
25% - 50%	Rendah Sekali	Konstruktif
50% - 75%	Sedang	Parsipatif
75% - 100%	Tinggi	Delegatif

*Semakin tinggi proporsi maka semakin tinggi otonomi daerah tersebut. (Abdul Halim, 2012)*

### Proporsi Ketidakmandirian Keuangan daerah

Proporsi Ketidakmandirian keuangan daerah dipakai untuk menganalisis seberapa besar ketidakmandirian keuangan daerah dengan menandingkan antara penghasilan transfer dengan penghasilan daerah, jika rasionya besar, ini berarti pemerintahan daerah sangat tergantung kepada pemerintah pusat untuk mendanai operasional pemangkuan pemerintahannya. Keberhasilan pemerintah pusat melakukan pengembangan jika rasio kabupaten induk tidak jauh beda dengan rasio kabupaten pengembangan atau rasio kabupaten pengembangan dibawah rasio kabupaten induk, dan sebaliknya maka di kategorikan pengembangan kabupaten tidak berhasil dilakukan.

Dari hasil pengamatan terlihat pada tabel 2, dimana rata-rata rasio proporsi ketidakmandirian keuangan daerah selama 8 tahun untuk kabupaten induk sebesar 88,09% masuk dalam kategori Tinggi, sedangkan untuk kabupaten pengembangan mendekati rasio induk, kecuali Kabupaten Pakpak Barat rasionya sebesar 99,50% yang artinya bahwa pengembangan Kabupaten Pakpak Barat telah gagal dilakukan oleh pemerintahan pusat, karena tingkat ketidakmandirian kabupaten tersebut sangat tinggi.

**Tabel 2**  
**Proporsi Ketidakmandirian Keuangan daerah**

Tahun	Proporsi Ketidakmandirian Keuangan daerah (Dalam %)								Rata-rata (Dalam %)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Tapanuli Utara	89.37	89.40	92.59	90.99	86.43	87.23	85.11	83.57	<b>88.09</b>
<b>Hasil Pengembangan Tapanuli Utara</b>									
Dairi	94.32	92.26	92.09	91.84	72.43	88.06	88.06	85.99	<b>88.13</b>
Pakpak Barat	93.49	94.13	136.08	96.34	94.27	94.76	83.10	103.84	<b>99.50</b>
Humbang hasundutan	94.57	108.94	91.45	85.48	86.39	83.49	80.02	78.78	<b>88.64</b>
Toba	79.57	91.22	86.75	80.45	78.74	76.29	73.85	72.76	<b>79.95</b>
Samosir	84.14	83.73	94.87	94.12	91.15	91.38	92.30	92.37	<b>90.51</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>89.22</b>	<b>94.06</b>	<b>100.25</b>	<b>89.64</b>	<b>84.60</b>	<b>86.80</b>	<b>83.47</b>	<b>86.75</b>	<b>89.35</b>

Sumber : Hasil olahan dari Informasi Laporan keuangan daerah setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2022

#### Tolak ukur

Ketidakmandirian(%)

0% - 25%

25% - 50%

50% - 75%

75% - 100%

Kapasitas keuangan

Rendah Sekali

Rendah

Sedang

Tinggi

*Semakin tinggi proporsi maka semakin tinggi Ketidakmandirian daerah terhadap penyelenggara pusat.*

### Proporsi Ukuran Desentralisasi Fiskus

Proporsi ini menakar seberapa besar ukuran desentralisasi fiskus dalam menghasilkan penghasilan asli daerah dengan menakar penghasilan asli daerah dengan penghasilan daerah, semakin tinggi rasionya maka semakin optimal

pemangku daerah dalam memperoleh penghasilan asli daerahnya tersebut (Mahmudi, 2016).

Dari hasil pengamatan terlihat pada tabel 3, dimana rata-rata rasio proporsi ukuran desentralisasi fiskus selama 8 tahun (2013-2020) kabupaten induk sebesar 8,62% masuk dalam kategori rendah sekali sedangkan untuk kabupaten pengembangan mendekati rata-rata rasio kabupaten induk, bahkan ada rata-rata rasionya lebih tinggi dari kabupaten induk, ini berarti bahwa pengembangan yang dilakukan adalah tepat, tetapi ada dua kabupaten pengembangan yang jauh dari rasio kabupaten induk yaitu kabupaten Pakpak Barat sebesar 4,52% dan Kabupaten Toba sebesar 3,93%, dari hasil ini, maka dapat dikatakan bahwa kedua kabupaten telah gagal dilakukan pengembangan dari sudut proporsi ukuran desentralisasi fiskus.

**Tabel 3**  
**Proporsi Ukuran Desentralisasi Fiskus**

Tahun	Proporsi Ukuran Desentralisasi Fiskus (Dalam %)								Rata-rata (Dalam %)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Tapanuli Utara	4.45	7.29	7.41	7.91	13.30	8.19	10.05	10.33	<b>8.62</b>
<b>Hasil Pengembangan Tapanuli Utara</b>									
Dairi	4.16	6.98	6.61	6.40	9.26	6.84	6.37	8.51	<b>6.89</b>
Pakpak Barat	2.33	3.32	7.25	3.65	5.72	3.75	5.74	4.44	<b>4.52</b>
Humbang hasundutan	54.87	56.91	71.15	52.69	30.88	92.50	74.62	75.45	<b>63.63</b>
Toba	2.76	3.42	3.60	2.66	2.71	5.47	5.10	5.70	<b>3.93</b>
Samosir	5.03	6.00	5.05	5.04	8.77	5.91	6.84	7.56	<b>6.28</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>13.83</b>	<b>15.33</b>	<b>18.73</b>	<b>14.09</b>	<b>11.47</b>	<b>22.89</b>	<b>19.73</b>	<b>20.33</b>	<b>17.05</b>

Sumber : Hasil olahan dari Informasi Laporan keuangan daerah setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2022

<b>Tolak ukur</b>	
<b>Proporsi</b>	<b>Keterangan</b>
0 -10%	Rendah Sekali
10 - 30%	Rendah
31 - 40%	Cukup
41 - 50%	Tinggi
>50%	Sangat Tinggi

Semakin tinggi sumbangan PAD maka semakin tinggi pula kapabilitas pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi (Bisma & Susanto, 2010).

### **Proporsi Keefektifan PAD**

Proporsi Keefektifan PAD mencerminkan kapabilitas pemerintah daerah dalam mewujudkan penghasilan asli daerah yang diprogramkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Proporsi Keefektifan PAD mengatakan kapabilitas pemerintah daerah dalam memobilisasi pemasukan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2016).

Dari hasil pengamatan terlihat pada tabel 4, dimana rata-rata rasio proporsi keefektifan PAD selama 8 tahun (2013-2020) kabupaten induk sebesar 110,25% sedangkan untuk kabupaten pengembangan mendekati rasio kabupaten induk, bahkan ada rasionya lebih tinggi dari kabupaten induk seperti Pakpak Barat sebesar

116,09%, sedangkan yang lainnya masih dibawah rasio kabupaten induk, tetapi selisihnya tidak jauh beda dengan rasio kabupaten induk, maka bisa dikatakan bahwa pengembangan kabupaten induk berhasil dilakukan oleh pemerintah pusat jika ditinjau dari proporsi ke efektifitas PAD.

**Tabel 4**  
**Proporsi Keefektifan PAD**

Tahun	Proporsi Keefektifan PAD (Dalam %)								Rata-rata (Dalam %)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Tapanuli Utara	101.05	130.98	115.83	101.92	102.77	91.75	108.27	129.44	<b>110.25</b>
<b>Hasil Pengembangan Tapanuli Utara</b>									
Dairi	138.97	89.77	79.19	103.28	104.04	74.74	86.28	103.26	<b>97.44</b>
Pakpak Barat	89.25	134.99	191.12	113.63	100.27	84.97	113.40	101.11	<b>116.09</b>
Humbang hasundutan	86.06	73.44	75.38	91.35	91.80	122.56	108.40	119.75	<b>96.09</b>
Toba	99.59	98.14	90.51	98.14	90.51	107.12	100.98	108.48	<b>99.19</b>
Samosir	115.72	133.63	120.07	107.44	98.60	87.40	93.16	90.59	<b>105.83</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>105.92</b>	<b>106.00</b>	<b>111.25</b>	<b>102.77</b>	<b>97.04</b>	<b>95.36</b>	<b>100.45</b>	<b>104.64</b>	<b>102.93</b>

Sumber : Hasil olahan dari Informasi Laporan keuangan daerah setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2022

<b>Tolak ukur</b>	
<b>Proporsi Efektifitas (%)</b>	<b>Kapasitas keuangan</b>
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90 – 99	Cukup Efektif
75 – 89	Kurang Efektif
< 75	Tidak Efektif

Semakin tinggi proporsi maka semakin tinggi kapabilitas pemerintah daerah dalam memobilisasi pemasukan PAD sesuai dengan anggarannya. (Mahmudi, 2016)

### Proporsi Keefisienan PAD

Proporsi Keefisienan PAD ini digunakan untuk menakar seberapa efisien pemangku pemerintah dalam melakukan pemungutan biaya perolehan PAD dibandingkan dengan realisasi PAD yang diperoleh pada periode tersebut, semakin kecil rasionya maka semakin efisien pemangku pemerintah dalam melakukan pembiayaan perolehan PAD.

Dari hasil pengamatan terlihat pada tabel 5, dimana rata-rata rasio proporsi keefisienan PAD kabupaten induk selama 8 tahun (2013-2020) sebesar rata-rata 0,86%, masuk dalam kategori sangat efisien, sedangkan untuk kabupaten pengembangan mendekati rasio kabupaten induk, bahkan ada rasionya lebih rendah seperti Kabupaten Humbanghasundutan, dimana rata-rata rasionya selama 8 tahun adalah sebesar 0,50%, sedangkan yang jauh rata-rata rasionya dari kabupaten induk adalah kabupaten Pakpak Barat sebesar 11% masuk dalam kategori efisien, maka dalam hal ini bisa dikatakan bahwa pengembangan kabupaten Pakpak Barat telah

gagal dilakukan oleh pemerintah pusat jika ditinjau dari segi proporsi keefisienan PAD.

**Tabel 5**  
**Perhitungan Proporsi Keefisienan PAD**

Tahun	Proporsi Keefisienan PAD (Dalam %)								Rata-rata (Dalam %)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Tapanuli Utara	1.37	1.23	0.97	1.14	0.49	0.52	0.51	0.65	<b>0.86</b>
<b>Hasil Pengembangan Tapanuli Utara</b>									
Dairi	1.37	1.38	0.95	0.93	0.52	0.34	1.04	0.85	<b>0.92</b>
Pakpak Barat	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>11.00</b>
Humbang hasundutan	0.00	1.00	0.65	0.86	0.51	0.00	0.59	0.37	<b>0.50</b>
Toba	0.59	1.02	1.12	4.50	2.92	1.42	2.08	1.77	<b>1.93</b>
Samosir	0.73	0.61	0.89	0.83	0.22	1.32	1.21	1.42	<b>0.90</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>0.54</b>	<b>0.80</b>	<b>0.72</b>	<b>19.03</b>	<b>0.83</b>	<b>0.62</b>	<b>0.98</b>	<b>0.88</b>	<b>3.05</b>

Sumber : Hasil olahan dari Informasi Laporan keuangan daerah setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2022

<b>Tolak ukur</b>	
<i>Keefisienan (%)</i>	<i>Kapasitas keuangan</i>
< 10%	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
> 40%	Tidak Efisien

Semakin tinggi proporsi maka semakin tinggi kapabilitas pemerintah daerah dalam memobilisasi pemasukan PAD sesuai dengan anggarannya. (Mahmudi, 2016)

### **Proporsi Keefektifan Fiskus daerah**

Analisis efektifitas fiskus daerah yaitu menganalisis kapabilitas pemerintah daerah dalam mendapatkan penghasilan asli daerah dengan cara membandingkan realisasi fiskus daerah dengan anggaran fiskus daerah (Abdul Halim, 2012).

Dari hasil pengamatan terlihat pada tabel 6, dimana rata-rata rasio proporsi keefektifan fiskus daerah kabupaten induk selama 8 tahun (2013-2020) sebesar 111,62% masuk dalam kategori sangat efektif, sedangkan untuk kabupaten pengembangan mendekati rasio kabupaten induk, bahkan ada rata-rata rasionya lebih tinggi dari kabupaten induk seperti Pakpak Barat sebesar 120,87% dan Kabupaten Samosir 115,59%, sedangkan yang lainnya masih dibawah rasio kabupaten induk, tetapi selisihnya tidak jauh beda dengan rata-rata rasio kabupaten induk, kecuali Kabupaten Humbanghasundutan dimana rata-rata rasionya sebesar 69,06% masuk dalam kategori tidak efektif, jika ditinjau dari proporsi keefektifan fiskus daerah, maka pengembangan Kabupaten Humbanghasundutan telah gagal dilakukan oleh pemerintah pusat.

**Tabel 6**  
**Proporsi Keefektifan Fiskus daerah**

Tahun	Proporsi Keefektifan Fiskus Daerah (Dalam %)								Rata-rata (Dalam %)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Tapanuli Utara	132.15	138.95	117.78	112.43	90.46	70.78	83.84	146.57	<b>111.62</b>
<b>Hasil Pengembangan Tapanuli Utara</b>									
Dairi	101.55	101.57	93.33	93.40	123.91	84.71	96.10	75.67	<b>96.28</b>
Pakpak Barat	122.76	163.12	119.58	129.50	107.08	73.85	110.78	140.26	<b>120.87</b>
Humbang hasundutan	71.35	61.48	51.90	29.38	35.24	101.68	82.96	118.47	<b>69.06</b>
Toba	96.44	91.14	58.30	32.57	37.92	110.42	85.17	117.57	<b>78.69</b>
Samosir	135.17	148.23	112.33	110.87	107.62	108.60	102.66	99.24	<b>115.59</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>109.90</b>	<b>117.41</b>	<b>92.20</b>	<b>84.69</b>	<b>83.71</b>	<b>91.67</b>	<b>93.59</b>	<b>116.30</b>	<b>98.68</b>

*Sumber : Hasil olahan dari Informasi Laporan keuangan daerah setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2022*

<b>Tolak ukur</b>	
<b>Proporsi Efektifitas (%)</b>	<b>Kapabilitas Finansial</b>
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90 – 99	Cukup Efektif
75 – 89	Kurang Efektif
< 75	Tidak Efektif

Semakin tinggi proporsi maka semakin tinggi kapabilitas pemerintah daerah dalam memobilisasi pemasukan PAD sesuai dengan anggarannya. (Mahmudi, 2016)

### **Proporsi Keefisienan Fiskus daerah**

Performa pemerintah daerah dalam melakukan biaya pengumpulan dibandingkan dengan realisasi fiskus daerah, semakin kecil proporsinya maka semakin efisien kabupaten dalam melakukan realisasi fiskus daerah. Dari hasil pengamatan terlihat pada tabel 7, dimana rata-rata rasio proporsi keefisienan fiskus daerah selama 8 tahun (2013-2020) untuk kabupaten induk sebesar 6,07% masuk dalam kategori sangat efisien, sedangkan untuk kabupaten pengembangan mendekati rata-rata rasio kabupaten induk, bahkan ada rata-rata rasionya lebih kecil dari kabupaten induk seperti Humbanghasundutan sebesar 3,04% dan Kabupaten Samosir sebesar 3,88%, sedangkan kabupaten pengembangan yang lainnya masih mendekati rasio kabupaten induk, kecuali kabupaten Pakpak Barat dimana rata-rata rasionya selama 8 tahun sebesar 76,80 masuk dalam kategori tidak efisien, dari hasil ini pengembangan kabupaten pakpak barat telah gagal dilakukan oleh pemerintah pusat.

**Tabel 7**  
**Proporsi Keefisienan Fiskus daerah**

Tahun	Proporsi Keefisienan Fiskus Daerah (Dalam %)								Rata-rata (Dalam %)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Tapanuli Utara	8.61	6.95	8.33	8.40	5.59	3.10	3.22	4.37	<b>6.07</b>
<b>Hasil Pengembangan Tapanuli Utara</b>									
Dairi	8.56	10.03	7.24	7.27	5.81	2.16	5.60	5.67	<b>6.54</b>
Pakpak Barat	0.00	0.00	0.00	614.43	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>76.80</b>
Humbang hasundutan	0.00	6.11	0.65	6.03	4.94	0.00	3.81	2.79	<b>3.04</b>
Toba	2.80	4.66	5.18	20.65	13.50	4.09	5.09	4.61	<b>7.57</b>
Samosir	3.29	2.93	5.00	4.66	1.11	4.23	4.22	5.63	<b>3.88</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>2.93</b>	<b>4.75</b>	<b>3.61</b>	<b>130.61</b>	<b>5.07</b>	<b>2.10</b>	<b>3.74</b>	<b>3.74</b>	<b>19.57</b>

Sumber : Hasil olahan dari Informasi Laporan keuangan daerah setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2022

<b>Tolak ukur</b>	
<i>Keefisienan (%)</i>	<i>Kapasitas keuangan</i>
< 10%	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
> 40%	Tidak Efisien

Performa pemerintah daerah otonom jika kurang dari 10% atau semakin kecil maka dapat dinyatakan semakin baik/efisien. (Mahsun, 2019)

### **Proporsi Ukuran Sumbangan BUMD**

Proporsi ini berguna untuk mengevaluasi sebesar besar laba BUMD dapat berkontribusi terhadap penghasilan daerah dengan cara menandingkan laba BUMD dengan Realisasi PAD (Mahmudi, 2016).

Dari hasil pengamatan terlihat pada tabel 8, dimana rata-rata rasio proporsi ukuran sumbangan BUMD selama 8 tahun (2013-2020) kabupaten induk sebesar 8,86% sedangkan untuk kabupaten pengembangan ada rata-rata rasionya lebih tinggi dari kabupaten induk seperti Kabupaten Dairi sebesar 13,23% dan Kabupaten Toba sebesar 13,41%, sedangkan yang lainnya masih dibawah rasio kabupaten induk, tetapi selisihnya tidak jauh beda dengan rasio kabupaten induk, kecuali kabupaten Samosir dimana rata-rata rasionya sebesar 5,88%, ini perlu ditinjau kembali, karena Kabupaten Samosir adalah pusat pariwisata di danau toba Sumatera utara, jadi dalam hal ini pemerintah pusat telah gagal dalam melakukan pengembangan kabupaten Samosir sebagai pusat pariwisata di Sumatera Utara bahkan di Indonesia.

**Tabel 8**  
**Proporsi Ukuran Sumbangan BUMD**

Tahun	Proporsi Ukuran Sumbangan BUMD (Dalam %)								Rata-rata (Dalam %)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Tapanuli Utara	18.96	7.04	8.99	10.02	5.26	8.96	5.99	5.67	<b>8.86</b>
<b>Hasil Pengembangan Tapanuli Utara</b>									
Dairi	20.91	7.81	11.95	14.75	8.39	17.59	9.11	15.34	<b>13.23</b>
Pakpak Barat	13.88	5.00	3.60	6.28	5.73	6.95	3.70	5.41	<b>6.32</b>
Humbang hasundutan	20.20	8.48	11.70	9.69	6.80	5.21	6.10	6.15	<b>9.29</b>
Toba	15.48	8.05	11.36	18.31	15.56	14.10	13.89	10.54	<b>13.41</b>
Samosir	6.05	3.23	6.19	5.84	4.53	5.72	7.49	8.03	<b>5.88</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>15.31</b>	<b>6.51</b>	<b>8.96</b>	<b>10.97</b>	<b>8.20</b>	<b>9.91</b>	<b>8.06</b>	<b>9.09</b>	<b>9.63</b>

Sumber : Hasil olahan dari Informasi Laporan keuangan daerah setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2022

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada proporsi Otonomi, kabupaten pengembangan yang mengalami kegagalan pengembangan hanya Kabupaten Pakpak Barat dimana rata-rata rasionya selama 8 tahun sebesar 4,54% sedangkan kabupaten induk sebesar 9,85%, artinya pemerintahan pusat melakukan kegagalan dalam pengembangan kabupaten Pakpak Barat, dimana dalam pembiayaan pembangunan, layanan dan program pemerintah masih sangat rendah sekali dibandingkan dengan kabupaten yang lainnya.

Pada Proporsi Ketidakmandirian Finansial selama 8 tahun, kabupaten yang mengalami kegagalan hanya kabupaten Pakpak Barat dimana rata-rata rasionya sebesar 99,05% sedangkan kabupaten yang lainnya mendekati kabupaten induk sebesar 88,09%, ini berarti Kabupaten Pakpak Barat memiliki tingkat ketidakmandirian yang tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain, berarti dalam hal ini pemerintah pusat telah gagal melakukan pengembangan akan kabupaten ini.

Untuk proporsi Ukuran Desentralisasi Fiskus terdapat 2 (dua) kabupaten yang mengalami pengembangan yaitu Kabupaten Pakpak Barat dimana rata-rata rasionya sebesar 4,52% dan Kabupaten Toba dengan rata-rata rasionya sebesar 3,93% dibandingkan dengan rata-rata rasio induk sebesar 8,24%, artinya bahwa kedua kabupaten ini dalam mengakali dan memaksimumkan penghasilan masih dikategorikan sangat rendah sekali. Maka dalam hal pengembangan pemerintah pusat telah gagal memekarkan kabupaten ini jika ditinjau dari proporsi ini.

Pada proporsi Keefektifan PAD selama 8 tahun semua kabupaten pengembangan mengalami keberhasilan karena rata-rata rasionya mendekati rata-rata rasio kabupaten induk sebesar 110,25% masuk dalam kategori sangat efektif, ini berarti kabupaten pengembangan dapat mewujudkan penghasilan asli daerah yang diprogramkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil pada daerah masing-masing kabupaten pengembangan. Jika ditinjau dari proporsi ini, berarti pemerintah pusat telah berhasil melakukan pengembangan kabupaten induk.

Pada proporsi pengukuran Keefisienan PAD hanya ada satu kabupaten yang rata-rata rasionya jauh dari kabupaten induk, yaitu kabupaten Pakpak Barat dimana rata-rata rasionya sebesar 11% masuk dalam kategori efisien, sedangkan kabupaten yang lainnya sama dengan kabupaten induk dengan rata-rata rasionya sebesar 0,86%

masuk dalam kategori sangat efisien, ini berarti Kabupaten Pakpak Barat dalam pengumpulan PADnya masuk dalam kategori efisien, tetapi dalam hal ini kabupaten Pakpak Barat tidak bisa mengikuti kabupaten lainnya dalam pengumpulan PADnya. Maka dalam hal ini pemerintah pusat telah gagal melakukan pengembangan Kabupaten ini.

Dalam pengukuran Proporsi Keefektifan Fiskus daerah, kabupaten Humbang Hasundutan mengalami kegagalan dalam proporsi ini, karena rata-rata rasionya selama 8 tahun sebesar 69,06% masuk dalam kategori tidak efektif dibandingkan dengan rata-rata rasio kabupaten induknya sebesar 6,07% masuk dalam kategori sangat efektif, ini berarti Kabupaten Humbang Hasundutan tidak efektif dalam mendapatkan penghasilan asli daerah, dan ini salah satu kegagalan pemerintah pusat dalam melakukan pengembangan kabupaten jika ditinjau dari pengukuran ini.

Pada proporsi keefisienan fiskus daerah, kabupaten Pakpak Barat juga mengalami kegagalan jika ditinjau pengukuran ini, karena rata-rata rasionya selama 8 tahun sebesar 76,08% masuk dalam kategori tidak efisien dibandingkan rata-rata rasio kabupaten induk sebesar 6,07% masuk dalam kategori sangat efisien, ini berarti bahwa Kabupaten Pakpak Barat dalam melakukan pengumpulan Fiskus daerah sangat tidak efisien, maka dengan demikian pengembangan kabupaten Pakpak Barat mengalami kegagalan.

Pada proporsi ukuran sumbangan BUMD, dari 5 (lima) kabupaten yang dikemangkan hanya Kabupaten Samosir yang penerimaan sumbangan BUMD yang paling kecil yaitu sebesar 5,88% sedangkan kabupaten induk rata-rata rasionya sebesar 8,86%, dalam hal ini Pemerintahan Kabupaten Samosir telah gagal memanfaatkan BUMD untuk menaikkan penghasilan PADnya, padahal Kabupaten Samosir ada pada tempat wisata danau toba, serta penghasil bawang putih terbesar di Sumatera Utara.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Dari hasil riset ini, bisa disimpulkan bahwa secara keseluruhan pengembangan Kabupaten Tapanuli Utara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat telah berhasil dilakukan, ini bisa dilihat dari analisis laporan keuangan pemerintah daerah yang tinjau dari 8 proporsi pengukuran, hanya kabupaten Pakpak Barat yang memiliki 5 proporsi pengukuran yang paling rendah dibandingkan dengan kabupaten pengembangan yang lain, sedangkan 3 kabupaten lain masing-masing memiliki satu kegagalan yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan yang memiliki kegagalan pada proporsi keefektifan fiskus daerah, Kabupaten Toba memiliki kegagalan dalam proporsi ukuran desentralisasi fiskus, sedangkan Kabupaten Samosir memiliki kelemahan pada proporsi ukuran sumbangan BUMD.

### **Keterbatasan**

Adapun yang menjadi keterbatasan dalam riset ini, adalah evaluasi kinerja pemerintah kabupaten hanya dilihat dari analisis laporan keuangan dengan 8 proporsi pengukuran, tahun pengamatan hanya 8 tahun saja yaitu tahun 2013-2020.

### Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Adapun yang menjadi saran dalam riset ini adalah untuk memperbanyak tahun pengamatan, serta untuk pemerintah daerah Kabupaten Pakpak agar dapat mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber manusia yang ada, sehingga kabupaten Pakpak Barat ini dapat sejajar ataupun lebih bagus dengan kabupaten pengembangan yang lain terutama dari kabupaten induk, untuk Kabupaten Humbang Hasundutan agar dapat lebih efektif dalam mendapatkan PADnya dan begitu juga untuk Kabupaten Toba harus mengoptimalkan dari proporsi pengukuran desentralisasi fiskus dan terakhir untuk kabupaten Samosir, harus mengoptimalkan sumber daya alam yang ada disekitar danau toba untuk menaikkan sumbangan BUMD terhadap PAD kabupaten Samosir.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (4th ed.)*. Penerbit Salemba Empat.
- Amanda, R., Arief, K., & Ishak, J. F. (2021). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(1), 52–62.
- Bisma, & Susanto. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007. *Ganec Swara*, 4(3), 75–86.
- Drastiana, T., & Himmati, R. (2021). Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Penilaian Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dan Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2019-2020. *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam*, 1(1), 51–65. <https://doi.org/10.21274/sosebi.v1i1.4915>
- Farida, A. S., & Nugraha, R. F. M. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(2), 107–124. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i2.7644>
- Hakim, & Rosidah, U. (2021). Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada BPPKAD Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2019). *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 4(1), 68–88.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34–38. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>
- Hariyanti, D., Marheni, & Yenfi. (2017). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2010-2015. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Bisnis Dan Keuangan (JIABK)*, 10(2), 48–59. [https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=AwrXhWjE\\_OVeamoAUij3RQx.;\\_ylu=X3oDMTByajVjNzRjBGNvbG8Dc2czBHBvcwM0BHZ0aWQDBHNIYwNzcg--/RV=2/RE=1592159556/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fwww.e-jurnal.stie-ibek.ac.id%2Findex.php%2FJIABK%2Farticle%2Fdownload%2F270%2Fpdf/RK=2/RS=5hCN](https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrXhWjE_OVeamoAUij3RQx.;_ylu=X3oDMTByajVjNzRjBGNvbG8Dc2czBHBvcwM0BHZ0aWQDBHNIYwNzcg--/RV=2/RE=1592159556/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fwww.e-jurnal.stie-ibek.ac.id%2Findex.php%2FJIABK%2Farticle%2Fdownload%2F270%2Fpdf/RK=2/RS=5hCN)
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2016.
- Mahsun, M. (2019). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik 1-9*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2019.
- Marliani, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung

- Tahun 2016-2020. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 14(1), 11–20. <https://doi.org/10.37151/jsma.v14i1.84>
- Melmambessy, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapura Ditinjau Dari Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal Dan Efektivitas. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 10–15. <https://doi.org/10.55049/jeb.v13i2.90>
- Moridu, I. (2021). Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai. *Jurnal Sinar Manajemen*, 08(02), 90–97. [file:///C:/Users/user/Downloads/1643-Article Text-3266-1-10-20210807 \(2\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/1643-Article Text-3266-1-10-20210807 (2).pdf)
- Mulyaningsih, A. P., & Sunaningsih, S. N. (2022). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus: BPPKAD Kabupaten Magelang tahun 2017 – 2020). *Distribusi - Journal of Management and Business*, 6(3), 612–622. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>
- Nalle, F. W., Oki, K. K., & Sangaji, P. M. M. (2021). Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Inovasi*, 17(1), 184–197. [https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/8067%0Afiles/1318/Nalle et al. - 2021 - Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pe.pdf](https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/8067%0Afiles/1318/Nalle%20et%20al.%20-%202021%20-%20Analisis%20kemampuan%20keuangan%20daerah%20dalam%20rangka%20pe.pdf)
- Nugraeni, Paramitalaksmi, R., & Wafa, Z. (2022). Kemandirian dan Efektivitas Pemerintah Daerah di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Riset Akuntansi*, 8(1), 22–29.
- Purbandari, T. (2019). Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan untuk Mewujudkan Efisiensi Anggaran (Studi pada Kabupaten Madiun). *Jurnal Pemerintahan, Pembangunan Dan Inovasi Daerah*, 1(1), 15–33. <https://jurnal.madiunkab.go.id/index.php/bp/article/view/14%0Ahttps://jurnal.madiunkab.go.id/index.php/bp/article/download/14/15>
- Sakinah, L., & Satriawan, B. (2021). Analisis Kapasitas Keuangan Daerah Empat Kabupaten Di Madura 2015-2019. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 2(2), 249–271.
- Saputra, B., & Fernando, R. (2017). Kontribusi Sumber-Sumber PAD Dalam Mendukung Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sleman. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1515–1534.
- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7, 147–153. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v7i2.1207>
- Setianingrum, R. D., & Haryanto. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(2), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Siswanto, & Maylani, D. A. (2022). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(1), 184–195.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>
- Susilawati, D., Kusumastuti Wardana, L., & Fajar Rahmawati, I. (2018). Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 91–98. <https://doi.org/10.18196/jati.010210>

- Tanan, C. I., & Duri, J. A. (2018). Analisis Rasio Untuk Pengukuran Kinerja Keuangan dan Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pemerintah Kota Jayapura). *Future: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 6(1), 91–101. <https://www.neliti.com/publications/276917/analisis-rasio-untuk-pengukuran-kinerja-keuangan-dan-evaluasi-kinerja-keuangan-p>
- Taras, T., & Artini, L. G. S. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Badung Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 6(5), 2360–2387.
- UU. (2004). *UU RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*.
- UU. (2014). *UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. <https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf>
- Widiyaningsih, V. A., & Prihatiningsih, M. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2017-2019. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, 54–67. <https://doi.org/10.47202/mak.v33i02.127>
- Wikipedia. (n.d.). *Kabupaten Tapanuli Utara*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Tapanuli\\_Utara](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tapanuli_Utara)
- Yakub, H., Wijaya, A., & Effendi, A. S. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta retribusi daerah dan kotribusinya terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 19(1), 15–28. <https://doi.org/10.29264/jkin.v19i1.10789>
- Zukhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 143–149. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.213>

